

## ABSTRAK

Perkembangan industri otomotif di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dan hal tersebut tentunya mendorong peningkatan transaksi jual beli kendaraan bermotor roda empat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang konsumen mengalami kerugian akibat ditemukannya cacat tersembunyi pada kendaraan yang dibelinya. Permasalahan ini sering menimbulkan sengketa hukum yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha tentang pemenuhan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan terkait kerugian konsumen akibat membeli mobil yang terdapat cacat tersembunyi serta mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan ketentuan yang terdapat di UUPK.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Serta analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan aspek pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR, sehingga beban pembuktian sepenuhnya dibebankan kepada konsumen. Hakim juga menilai bahwa rasa tidak aman dan tidak nyaman yang dialami konsumen adalah hal yang bersifat subjektif dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya cacat tersembunyi. Dan hakim juga belum secara optimal dalam mempertimbangkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan spesifikasi teknis kendaraan kepada konsumen. Pertimbangan tersebut belum selaras dengan prinsip perlindungan konsumen dalam UUPK, khususnya pada Pasal 4 huruf (a), Pasal 7 (b), dan Pasal 28 UUPK yang mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta prinsip pembuktian terbalik. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut belum optimal dalam penerapan UUPK.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Cacat Tersembunyi, Kendaraan Roda Empat, Pertimbangan Hakim, UUPK

## ABSTRACT

*The development of the automotive industry in Indonesia has experienced significant growth, which has consequently led to an increase in transactions involving four-wheeled motor vehicles. However, in practice, consumers often suffer losses due to the discovery of a hidden defect in the vehicles they purchase. This issue frequently gives rise to legal disputes between consumers and business actors, particularly concerning the fulfilment of consumers' rights to comfort, safety, and security in consuming goods or services as regulated under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. This study aims to analyze the judges' legal considerations in Decision Number 491/Pdt.G.2023/PN Jakarta Selatan concerning consumer losses resulting from the purchase of a vehicle with hidden defects, as well as to examine the conformity of such considerations with the provisions of the Consumer Protection Law.*

*The legal research employs a normative legal research method using a statutory approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is conducted qualitatively using a descriptive-analytical method.*

*The result of this study indicates that the judges' considerations in the decision place greater emphasis on evidentiary aspects based on Article 163 of the HIR, thereby imposing the burden of proof entirely on the consumer. The judges also considered that the feeling of insecurity and discomfort experienced by the consumer was subjective in nature and could not be used as a basis to establish the existence of a hidden defect. Furthermore, the judges did not optimally consider the obligation of business actors to provide accurate, clear, and honest information regarding the condition and technical specifications of the vehicle to the consumer. Such considerations are not consistent with the principle of consumer protection under the Consumer Protection Law, particularly Article 4 letter (a), Article 7 letter (b), and Article 28, which regulate consumers' rights and the obligations of business actors, and the principle of reversed burden of proof. Therefore, this study concludes that the application of the Consumer Protection Law in the decision has not been optimal.*

*Keywords: Consumer Protection, Hidden Defect, Four-Wheeled Motor Vehicles, Judges' Considerations, Consumer Protection Law*